

BAB III ISLAMIC MILITARY ALLIANCE TO FIGHT TERRORISM

Serangan 11 September 2001 telah mengguncang sistem internasional dan mengubah pandangan dunia internasional terhadap terorisme. Efek besar yang ditimbulkan oleh sebuah serangan terorisme bukan hanya pada kerusakan materi, tetapi juga pada manusia. Dampak lain akibat dari sebuah serangan terorisme adalah dapat merusak citra suatu negara, dan bahkan berakibat pada macetnya pembangunan dan ekonomi suatu negara.

Gerakan bersama dalam pemberantasan terorisme perlu dilakukan oleh semua negara. Karena pemberantasan terorisme tidak dapat dilakukan hanya oleh sepihak, dimana saat ini terorisme telah memiliki sebuah jaringan dalam ruang lingkup internasional. Sebagaimana doktrin yang dipromosikan oleh Presiden Amerika Serikat George W. Bush yakni *Global War on Terrorism*.

Hasilnya dunia internasional menjawab tantangan dari ancaman terorisme dengan melakukan kerjasama Internasional seperti halnya kerjasama antar penegak hukum dan intelijen dunia. Bertambahnya, undang-undang baru, perjanjian dan organisasi internasional yang menjadi sebuah rezim kontra-terorisme internasional (Keiber, 2016).

Bab ini akan menjabarkan mengenai kemunculan *Islamic Military Alliance to Fight Terrorism* sebagai sebuah kerjasama internasional dalam penanganan terorisme. Pembahasannya akan berkaitan dengan, sejarah, formasi, prinsip, keanggotaan, dan reaksi dunia.

A. Sejarah kemunculan *Islamic Military Alliance to Fight Terrorism*

Pada akhir tahun 2015 muncul sebuah kerjasama lintas negara dalam pemberantasan dan penanggulangan terorisme global. Mereka mendeklarasikan diri sebagai *Islamic Military Alliance to Fight Terrorism*, selanjutnya dapat pula disebut sebagai Aliansi Militer Islam. Pembentukan kerjasama Aliansi Militer Islam ditujukan untuk melakukan pemberantasan terorisme secara kolektif atau bersama-sama. Hal ini didasarkan kepada kondisi negara-negara muslim dalam menghadapi ancaman terorisme yang penanggulangannya masih terbatas pada masing-masing negara.

Aliansi militer islam ini merupakan sebuah kerjasama untuk memberantas terorisme dalam kerangka kerja aliansi militer. Secara umum aliansi dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan baik secara formal maupun informal yang bertujuan untuk melindungi diri dari ancaman yang datang dari pihak eksternal atau internal. Aliansi sendiri, menurut Stefan Bergsmann didefinisikan sebagai sebuah kesepakatan secara eksplisit antar negara dalam kaitan keamanan nasional, dimana pihak-pihak saling berjanji saling membantu dalam bentuk sumber daya di dalam kasus-kasus tertentu (Bergsmann, 2001). Sementara itu aliansi menurut Griffiths dan Terry mendefinisikan aliansi sebagai sebuah kesepakatan antar dua negara atau lebih untuk bekerja sama dalam masalah keamanan bersama (Griffiths, O'Callaghan, and Roach (2008)).

Aliansi ini masih berada pada tahapan pengembangan dan belum merumuskan program kerja yang secara spesifik dalam kerangka kerjasamanya.

Namun secara garis besar aliansi ini akan berada pada ruang lingkup militer dan keamanan, serta pada penangkalan ideologi radikal (Abdelaziz & Payne, 2015).

B. Formasi dalam *Islamic Military Alliance to Fight Terrorism*

Islamic Military Alliance to Fight Terrorism merupakan sebuah inisiatif dari pemerintah Arab Saudi. Pembentukannya disampaikan oleh menteri Pertahanan Arab Saudi, Muhammad Bin Salman dalam jumpa pers pada tanggal 15 Desember 2015. Dalam kesempatan itu disampaikan bahwa Aliansi Militer Islam merupakan sebuah kerjasama internasional dalam penanggulangan terorisme. Anggota aliansi ini berjumlah 34 negara yang terdiri dari negara-negara Islam dan beberapa dari negara-negara mayoritas Muslim. Dengan pusat komando operasi gabungan yang akan didirikan di kota Riyadh. Pusat komando ini nantinya akan berfungsi untuk mengkoordinasikan dan mendukung operasi militer dalam memerangi terorisme serta untuk mengembangkan program-program lainnya yang berkenaan dalam pemberantasan terorisme (Irish & Browning, 2015a).

Lebih lanjut Muhammad bin Salman menyampaikan bahwa terorisme merupakan pelanggaran serius terhadap martabat dan hak-hak manusia, terutama hak untuk hidup dan hak untuk mendapat keamanan. Ia melihat pada saat ini sejumlah negara, termasuk negara-negara Arab dan Afrika telah sangat menderita akibat terorisme. Oleh karenanya pemecahan masalah ini memerlukan upaya yang kuat dan kolektif. Dengan adanya aliansi ini, upaya dan koordinasi di antara

negara-negara anggota untuk mengatasi terorisme akan dapat terlaksana lebih baik (Maqsood, 2016).

Berikut kutipan pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad bin Salman pada 15 Desember 2015 :

“In the name of Allah, the Merciful,

Praise be to Allah and peace be upon Muhammad, the messenger of Allah, Based on the Lord's guidance in the Holy Quran: (And cooperate in righteousness and piety, but do not cooperate in sin and aggression), and on the teachings of the Islamic Shari'a and provisions that reject terrorism in all its forms and manifestations because it is a heinous crime and injustice rejected by all heavenly religions and human instinct.

Since terrorism and its atrocities - which spread Shari'a-forbidden corruption and destruction in the world - constitute a serious violation of human dignity and rights, especially the right to life and the right to security, and subject the interests of countries and communities to danger and threaten their stability; and acts of corruption and terrorism cannot be justified in any way, and hence it should be fought by all means and collaboration should be made to eliminate it because this is cooperation in righteousness and piety” (Saudi Press Agency, 2015).

Dalam kesempatan berbeda menteri luar negeri Arab Saudi Adel Al-Juberi dalam sesi wawancara dengan harian *The Sydney Morning Herald* mengatakan bahwa dalam aliansi pimpinan Arab Saudi ini, negara-negara anggota akan berbagi informasi, pelatihan, dan peralatan. Serta akan memberikan bantuan militer jika diperlukan dalam memerangi kelompok militan seperti *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) dan Al-Qaeda. Semua kemungkinan akan diperhitungkan, bahkan jika untuk menerjunkan pasukan di lapangan. Hal ini tergantung pada permintaan yang datang, pada kebutuhan, serta kemauan negara untuk memberikan dukungan yang diperlukan. Tidak ada batasan dalam meminta

bantuan, jika negara membutuhkan bantuan mereka bisa datang dan meminta bantuan. Negara-negara yang dapat memberikan bantuan akan menyediakan bantuan tersebut disesuaikan pada kasus per kasus (Irish & Browning, 2015b).

Panglima dalam aliansi ini telah diputuskan oleh Arab Saudi dengan menunjuk Jenderal Raheel Sharif pada 6 Januari 2017. Jenderal Sharif merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, dimana ia pensiun pada tanggal 29 November 2016 (Boone, 2017). Dalam penunjukannya tersebut Jenderal Sharif mengajukan tiga syarat, yang kemudian juga disetujui oleh Arab Saudi. Tiga syarat tersebut yakni; Iran harus diundang dan dimasukan sebagai anggota koalisi; bekerja secara independen, tanpa perintah dan tekanan dari siapapun atau tidak ada komando lebih tinggi darinya; serta diberikan mandat sebagai mediator untuk memediasi antar negara anggota aliansi jika ada saling ketidaksepahaman (Dunyanews, 2017).

Jenderal Sharif sendiri merupakan jenderal yang dianggap cukup berhasil dalam melaksanakan tugasnya. Dimana dalam masa jabatannya selama tiga tahun sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Pakistan (2013-2016), ia berhasil menurunkan serangan teroris di Pakistan hingga 70% (The Express Tribune, 2015).

C. Prinsip dan Tujuan *Islamic Military Alliance to Fight Terrorism*

1. Prinsip

Pemerintah Saudi menyatakan Aliansi Militer Islam akan beroperasi sejalan dengan PBB, Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan konvensi

internasional lainnya. Serta akan terus berkomitmen pada ketentuan dalam Piagam PBB dan Piagam Organisasi Kerjasama Islam. Arab Saudi menegaskan adalah hak setiap negara untuk membela diri sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip hukum internasional, Piagam PBB dan atas dasar ketentuan konvensi OKI tentang Pemberantasan Terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya (Rash & Moran, 2015).

2. Tujuan

Aliansi ini masih dalam tahap pembentukan dan belum merumuskan kerangka kerja secara spesifik, namun tujuan dari aliansi ini secara umum sebagai berikut (Business Recorder, 2015) ;

- Mengupayakan koordinasi dalam memerangi terorisme di negara-negara seperti Irak, Suriah, Libya, dan Afghanistan;
- Bekerjasama dengan dunia internasional dan dengan negara-negara kekuatan utama dunia serta organisasi internasional untuk melaksanakan operasi militer melawan ISIS di Suriah;
- Melawan organisasi teroris internasional dan regional, membantu anggota yang berpartisipasi untuk melawan semua kelompok kejahatan dengan menyediakan dukungan militer (Irish & Browning, 2015a);
- Memerangi ISIS, Al-Qaida dan Boko Haram,
- Untuk melindungi semua negara anggota terhadap ancaman terorisme (Arab News, 2016);
- Untuk mengatasi dan memberantas kelompok teroris lainnya (Maqsood, 2016).

Dalam perkembangannya Aliansi Militer Islam akan membantu negara-negara anggota untuk melawan terorisme dengan cara lebih baik dan terencana. Kemitraan ini akan didasarkan pada *sharing-data intelligence*, pelatihan, mempersiapkan dan memberikan dukungan militer. Aliansi ini juga akan memiliki fokus operasi bersama yang akan memfasilitasi dan memperkuat operasi militer untuk memerangi terorisme (Abbasi, 2016).

D. Keanggotaan

Berikut adalah daftar negara-negara yang menyatakan bergabung dalam *Islamic Military Alliance to Fight Terrorism*. Meskipun tergabung dalam aliansi ini, tidak semua negara bersedia membantu secara militer. Beberapa negara menyatakan mendukung secara militer, sementara beberapa negara lainnya hanya sebatas mendukung dan menolak membantu secara militer. Hal ini karena pemerintah Arab Saudi menyerahkan sepenuhnya kepada negara-negara anggota untuk dapat berpartisipasi melalui cara apapun yang mereka bisa. Partisipasi ini, misalnya, dapat mencakup penyediaan informasi atau senjata, dukungan logistik, pelatihan atau bantuan keuangan kepada tentara yang berpartisipasi, namun demikian, fungsi utama dalam koalisi ini akan tetap dalam kerangka kerja aliansi militer (Fouad, 2016).

Jumlah negara yang menyatakan bergabung ke dalam *Islamic Military Alliance to Fight Terrorism* sampai pada Januari 2017 berjumlah 37 negara. Dari jumlah tersebut 34 diantaranya merupakan anggota yang disampaikan langsung pada saat pengumuman pembentukan *Islamic Military Alliance to Fight Terrorism* pada 15 Desember 2015 (Abdelaziz & Payne, 2015).

Tabel 3. 1**Daftar Negara-negara Anggota *Islamic Military Alliance to Fight Terrorism***

No	Negara	Peran Militer	Tanggal Bergabung	No	Negara	Peran Militer	Tanggal Bergabung
1.	Afganistan	YA	18 Oktober 2016	20.	Oman	YA	28 December 2016
2.	Bahrain	YA	15 Desember 2015	21.	Nigeria	YA	15 Desember 2015
3.	Bangladesh	YA	15 Desember 2015	22.	Pakistan	YA	15 Desember 2015
4.	Benin	-	15 Desember 2015	23.	Palestine	-	15 Desember 2015
5.	Chad	YA	15 Desember 2015	24.	Qatar	YA	15 Desember 2015
6.	Comoros	-	15 Desember 2015	25.	Senegal	-	15 Desember 2015
7.	Cote d'Ivoire	-	15 Desember 2015	26.	Sierra Leone	-	15 Desember 2015
8.	Djibouti	-	15 Desember 2015	27.	Somalia	YA	15 Desember 2015
9.	Egypt	YA	15 Desember 2015	28.	Sudan	YA	15 Desember 2015
10.	Gabon	-	15 Desember 2015	29.	Saudi Arabia	YA	15 Desember 2015
11.	Eritrea	YA	20 December 2015	30.	Togo	-	15 Desember 2015
12.	Guinea	-	15 Desember 2015	31.	Tunisia	YA	15 Desember 2015
13.	Jordan	YA	15 Desember 2015	32.	Turki	YA	15 Desember 2015
14.	Kuwait	YA	15 Desember 2015	33.	Uni Emirat Arab	YA	15 Desember 2015
15.	Lebanon		15 Desember 2015	34.	Yaman	YA	15 Desember 2015
16.	Libya	YA	15 Desember 2015	35.	Mauritania	YA	15 Desember 2015
17.	Malaysia	-	15 Desember 2015	36.	Morocco	YA	15 Desember 2015
18.	Maldives	-	15 Desember 2015	37.	Niger	YA	15 Desember 2015
19.	Mali	-	15 Desember 2015				

Sumber : Wikipedia

E. Kekuatan Militer

Tabel 3. 2

Daftar Kekuatan Militer Utama *Islamic Military Alliance to Fight Terrorism*

Negara	Anggaran Pertahanan	Pasukan Aktif	Pasukan Cadangan	Tank	Pesawat Tempur	Kendaraan Lapis Baja	Artileri	Helikopter	Peluncur Roket	Kapal Laut
Turkey	\$18.19bn USD	410,500	185,630	3,778	1,020	7,550	679	443	811	115
Pakistan	\$7bn USD	617,000	51,500	2,924	914	2,828	3,278	313	143	74
Egypt	\$4.1bn USD	468,500	800,000	4,624	1,107	13,949	2,360	200	1,481	221
Saudi Arabia	\$46bn USD	233,500	25,000	1,210	675	6,472	432	182	322	55
Morocco	\$3.4bn USD	195,800	150,000	1,215	282	2,384	192	125	72	121
UAE	\$15.2bn USD	65,000	0	545	479	2,204	105	185	54	75
Jordan	\$1.3bn USD	110,000	6,500	1,250	246	2,547	72	116	88	37
Kuwait	\$5.1bn USD	15,500	31,100	368	105	861	0	42	27	38
Qatar	\$1.93bn USD	11,800	0	92	72	464	12	43	21	80

Sumber : (Bhattacharjee, 2016) & globalfirepower.com

F. Reaksi Dunia

1. Amerika Serikat

Pemerintah Amerika Serikat menyatakan menyambut baik atas kemunculan aliansi inisiatif Arab Saudi dalam upaya memberantas terorisme. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Pertahanan AS Ash Carter yang menyatakan, "Kami berharap untuk mempelajari lebih lanjut tentang apa yang Arabia Saudi pikirkan dalam hal koalisi ini. Dan secara umum tampaknya aliansi ini sangat sejalan dengan sesuatu yang kita sudah laksanakan dalam beberapa waktu, yakni keterlibatan dalam kampanye untuk memerangi ISIS oleh negara-negara Sunni Arab" (DeYoung, 2015).

2. Tiongkok

Tiongkok menyatakan mengapresiasi dan mendukung pembentukan aliansi ini, serta menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel Al-Jubeir, pasca pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di sela-sela pertemuan *International Suriah Support Group* di New York (Arab News, 2015).

Ditempat berbeda, Duta Besar Tiongkok untuk Arab Saudi Li Chengwen juga mengatakan bahwa Arab Saudi dan Tiongkok berpendapat sama tentang perlunya upaya untuk memerangi terorisme dalam segala bentuknya. Tiongkok mendukung upaya politik Arab Saudi di kancah internasional dalam memerangi terorisme serta mempromosikan keamanan dan perdamaian baik dalam regional maupun internasional. Duta Chengwen kemudian menambahkan bahwa Tiongkok

mengundang upaya internasional untuk bersama-sama dan berkolaborasi dalam memerangi terorisme global (Asharq Al-Aswat, 2015).

3. Jerman

Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen menyambut baik kemunculan *Islamic Military Alliance to Fight Terrorism*, aliansi akan sangat membantu jika bergabung dengan negara-negara lain yang saat ini masih berjuang melawan kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Ia juga menambahkan bahwa kelompok teroris ini telah menambah kekuatan dari lambatnya tarik ulur antara berbagai pihak yang berujung pada ketidaksepakatan mengenai cara untuk melawan ISIS. Ursula von der Leyen kemudian menekankan bahwa aliansi ini harus sejalan dengan proses dialog perdamaian di Wina, dimana telah melibatkan banyak negara yang berperang melawan ISIS seperti AS, Eropa, Rusia, Turki, Arab Saudi, termasuk juga Iran dan Tiongkok (Martin & Barrington, 2015).

4. Malaysia

Menteri Pertahanan Malaysia Hishammuddin Hussein mengatakan bahwa Malaysia turut berpartisipasi dalam koalisi 34 negara-negara Islam untuk memerangi terorisme. Namun partisipasi Malaysia dalam aliansi tersebut tidak melibatkan komitmen militer (Augustin, 2015).

Ditempat berbeda Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razak juga menjabarkan bahwa kemunculan aliansi ini berada di saat yang tepat karena kesatuan bangsa Muslim tidak hanya sekedar retorika, tapi harus diungkapkan dengan tindakan. Ia menekankan bahwa Arab Saudi saat ini berada di bawah

ancaman, oleh karena itu negara-negara yang mendukung Kerajaan ini harus siap untuk berdiri bersama Arab Saudi. “Tindakan kita harus menunjukkan solidaritas dengan Arab Saudi. Menjadi anggota Aliansi Militer Islam akan mengirimkan sinyal yang sangat kuat bahwa Arab Saudi tidak sendirian dalam menghadapi ancaman yang dapat membahayakan itu”. PM Najib kemudian menjelaskan bahwa saat ini Malaysia memulai dari hal yang paling bawah. Yakni dengan menjadi pendukung, dan akan ada kemungkinan Malaysia untuk meningkatkan taraf partisipasi di dalam aliansi ini (New Strait Times Online, 2016).

5. Mesir

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mesir Ahmed Abo-Zeid mengatakan bahwa Mesir akan menjadi bagian dari aliansi ini, karena Mesir akan selalu mendukung semua upaya untuk memerangi terorisme, terutama jika upaya tersebut dalam lingkup Islam dan negara-negara Arab. Sementara itu otoritas tertinggi Sunni Mesir, Al-Azhar, menyambut baik keputusan Arab Saudi yang membentuk Aliansi Militer Islam untuk memerangi terorisme, dan menggambarannya sebagai "sejarah." Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di situsnya Al-Azhar mengatakan, pihaknya telah berulang kali menyerukan koalisi seperti itu, menyerukan semua negara Muslim untuk bergabung melawan terorisme dalam segala bentuknya (Ahram Online, 2015).

6. Bangladesh

Perdana Menteri Sheikh Hasina mengatakan bahwa aliansi ini telah menciptakan kesempatan bagi seluruh umat Islam untuk bersatu dalam memerangi terorisme dan militansi. Pemerintahannya juga menegaskan *zero tolerancy*

terhadap terorisme dan akan melakukan apa saja yang diperlukan untuk membasmi terorisme dan militansi. Serta bertekad untuk mencegah terulangnya insiden (aksi militan) yang terjadi dan akan terus mendesak umat Islam untuk melawan militansi (The Daily Star, 2016).

7. Pakistan

Kementerian Luar Negeri Pakistan dalam keterangan pers menjelaskan bahwa Pakistan telah konsisten mendukung semua upaya regional dan internasional untuk memerangi militansi, ekstremisme, dan terorisme. Dalam konteks ini Pakistan menyambut baik pembentukan aliansi 34-Negara untuk melawan terorisme dan sedang menunggu rincian lebih lanjut untuk menentukan tingkat partisipasi dalam aliansi ini (Sputnik News, 2015).

8. Nigeria

Presiden Nigeria Muhammadu Buhari mengakui bahwa Nigeria memang bergabung dengan koalisi melawan terorisme. Ia menjelaskan bahwa aliansi ini berusaha untuk mengakhiri ancaman terorisme dan merupakan suatu hal yang tepat apabila Nigeria menjadi bagian dari blok ini. Karena Nigeria memiliki permasalahan ancaman dari kelompok teroris yang mengatasnamakan diri mereka sebagai bagian dari Islam yakni kelompok Boko Haram. Presiden Buhari kemudian menambahkan, jika ada koalisi Islam untuk melawan aksi terorisme, Nigeria akan menjadi bagian dari itu. Karena Nigeria adalah korban dari terorisme yang mengatasnamakan Islam (Akinbajo, 2016).

9. Turki

Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu menyebutkan Turki siap untuk membuat setiap kontribusi yang terkait dengan perang melawan terorisme, terlepas dari mana dan oleh siapa upaya tersebut dijalankan. Turki akan memberikan dukungan untuk semua inisiatif melawan teror, sebagai catatan bahwa keikutsertaannya dalam Aliansi Militer Islam adalah refleksi dari tekad pemerintah Turki dalam memerangi terorisme global (Hurriyet Daily News, 2016).

PM Ahmet menambahkan meningkatnya suara negara-negara Muslim dalam satu suara bersama untuk melawan teror adalah jawaban terbaik bagi mereka yang mencoba mengaitkan teror dengan Islam. Dalam konteks ini, Turki siap untuk memberikan kontribusi yang terbaik dalam perjuangan melawan teror. Serta menilai upaya yang diambil negara-negara Muslim ini sebagai langkah yang tepat.

10. Palestina

Duta Besar Palestina untuk Mesir dan perwakilan tetap untuk Liga Arab, Jamal Al-Shobki, menggambarkan keanggotaan negaranya dalam Aliansi Militer Islam, yang terdiri dari 34 negara melawan terorisme, membawa arti simbolik bagi Palestina. Dalam sebuah pernyataan, ia mengatakan bahwa palestina telah menderita dari pendudukan bangsa Israel. Kehadiran kami di aliansi ini adalah pesan bahwa Palestina adalah bagian dari sebuah bangsa. Aliansi ini juga akan menjadi sebuah jaring pengaman bagi warga Palestina (Alekhbariya, 2015).

11. Indonesia

Sikap pemerintah Indonesia terkait undangan Arab Saudi untuk bergabung ke dalam Aliansi Militer Islam disampaikan Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir dalam keterangan pers pada 15 Desember 2015. Nasir menjelaskan bahwa pemerintah Arab Saudi pada awalnya hanya menyampaikan niat untuk membentuk *Center to Coordinate Extremism and Terrorism* yang akan melibatkan negara-negara Islam baik di Timur Tengah, Asia dan Afrika. Kemudian Indonesia merespon dengan meminta Arab Saudi untuk mengirimkan *modalitas* dan *term of reference* (TOR) dari rencana tersebut (Maulana, 2015).

Namun sampai pihak Arab Saudi mengumumkan aliansi militernya, pemerintah belum mendapat jawaban yang pasti. Dirinya menambahkan, pemerintah Indonesia mengaku terkejut ternyata Arab Saudi membentuk aliansi militer, dan bukan pusat penanggulangan ekstrimisme dan terorisme (*Center to Coordinate Extremism and Terrorism*) sebagaimana disampaikan oleh Arab Saudi diawal. Indonesia kemudian menyatakan menolak undangan untuk bergabung dalam aliansi militer tersebut, karena tidak sejalan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia (Ramadhan, 2015).

Hal ini kemudian dipertegas oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno L.P Marsudi, sebagaimana disampaikan dalam wawancara khusus bersama Merdeka.com yang menyatakan bahwa posisi Indonesia sudah jelas tidak dapat bergabung. Karena kerjasama yang diajukan Arab Saudi merupakan kerjasama

aliansi militer, sementara prinsip politik luar negeri Indonesia tidak mengizinkan mengikuti aliansi semacam itu.

Menlu Retno kemudian menambahkan bahwa selama Republik Indonesia berdiri, tidak pernah mengikuti aliansi militer semacam ini. Pengerahan militer yang dilaksanakan oleh Indonesia hanya dalam konteks Pasukan Perdamaian PBB, selain itu tidak bisa. Terkait permasalahan terorisme, pemerintah Indonesia memiliki strategi tersendiri dalam penanggulangan terorisme, yang cukup efektif dan telah diapresiasi oleh berbagai negara (Mohamad & Putri Hanggoro, 2016).